

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan merupakan rangkaian upaya yang berkesinambungan, yang meliputi seluruh kehidupan manusia, bangsa dan negara, untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan nasional, bagi negara Indonesia yang terdiri dari berbagai daerah dengan kelebihan dan kekurangan yang dimiliki. Pembangunan nasional bertujuan mewujudkan masyarakat adil makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dengan memanfaatkan kekayaan daerah yang dimiliki daerah masing-masing. Oleh karena itu pemerintah dalam melaksanakan pembangunan nasional berupaya untuk meratakan pembangunan beserta hasil-hasil pembangunan di daerah perlu mendapatkan perhatian sehingga pertumbuhan ekonomi di daerah mengalami peningkatan. (Lincoln Arsyad, 1998)

Pembangunan di daerah perlu diarahkan agar lebih mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dalam upaya untuk meningkatkan pendapatan nasional. PAD adalah Pendapatan Asli Daerah yang merupakan potensi yang berada di daerah dan dikelola oleh pemerintah daerah yang bersangkutan. Kaitannya dalam menghadapi era globalisasi, salah satu strategi pemerintah dalam meningkatkan daya saing adalah dengan mengoptimalkan efisiensi dan efektifitas pemerintah yaitu dengan meningkatkan dan memanfaatkan otonomi daerah khususnya daerah tingkat II. (Lincoln Arsyad, 1998)

Pendapatan Asli Daerah dewasa ini merupakan primadona pemerintah daerah bagi setiap daerah. Karena itu, pemungutan Pendapatan Asli Daerah harus terus diupayakan agar lebih efektif dan efisien sehingga dapat mendukung pembangunan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah, dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang nyata dan bertanggung jawab. Pemerintah daerah dalam penjelasan UU diberikan kewajiban untuk menggali sumber-sumber keuangan daerahnya sendiri berdasarkan perundang-undangan yang berlaku. Negara Indonesia sebagai negara kesatuan, perubahan di daerah harus diarahkan dan dibina untuk ditingkatkan. Untuk mendapatkan pertumbuhan ekonomi di daerah diperlukan upaya perbaikan dalam bidang keuangan daerah, maka pemerintah memberikan kebebasan untuk membina keuangan daerah sendiri dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Pemerintah daerah diberi hak untuk mengatur rumah tangganya sendiri yang terjamin atas berlakunya otonomi daerah. Menurut UU No.22 Tahun 1999 yang dimaksud otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.(UU No.22 1999).

Kemandirian keuangan daerah dalam meningkatkan kemampuannya mencakup pada penggalian dan mobilisasi sumber-sumber pendapatan daerah. Sumber tersebut salah satunya adalah Pendapatan Asli Daerah. Undang-Undang tentang Pendapatan Asli Daerah yaitu UU No.22 Tahun 1999 tentang pemerataan daerah disebut bahwa sumber-sumber pendapatan daerah meliputi:

1. Pendapatan Asli Daerah sendiri terdiri dari :

- Hasil pajak daerah
- Retribusi daerah
- Hasil perusahaan daerah
- Penerimaan dari dinas-dinas
- Lain-lain hasil usaha daerah yang sah

2. Pinjaman daerah

3. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan bagian dari sumber pendapatan daerah yang secara bebas dapat digunakan oleh masing-masing daerah. Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada kenyataannya masih kecil. Selama ini sumbangan pemerintah pusat masih mendominasi dalam penerimaan daerah. Keadaan ini menunjukkan bahwa ketergantungan pemerintah daerah terhadap pusat masih cukup besar. Untuk mengurangi ketergantungan tersebut maka pemerintah daerah perlu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah

Besarnya sumbangan retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah disebabkan banyaknya instrument yang mendukung retribusi daerah. Retribusi daerah tingkat II sangat beraneka ragam namun demikian diantara bermacam macam jenis retribusi yang dipungut pemerintah dati II hanya beberapa diantaranya yang potensial, yaitu retribusi pasar, Retribusi Rumah sakit dan Balai Pengobatan, retribusi terminal bus dan retribusi mendirikan bangunan.

Untuk sektor retribusi di Kabupaten Temanggung dari tahun ke tahun relatif mengalami peningkatan. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat dalam tabel berikut ini:

TABEL 1.1
Daftar Penerimaan Retribusi di Kabupaten Temanggung
Tahun 2002-2006

No	Tahun	Pendapatan Retribusi
1	2002	Rp 10.975.153.000
2	2003	Rp. 12.567.450.000
3	2004	Rp. 11.544.850.000
4	2005	Rp. 12.754.739.434
5	2006	Rp. 15.753.225.345

Sumber : BPS Kabupaten Temanggung

Untuk pendapatan selain retribusi seperti misalnya pendapatan dari sektor pajak daerah jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan sektor retribusi, seperti yang terdapat dalam tabel di bawah ini:

TABEL 1.2
Daftar Pendapatan Pajak Daerah di Kabupaten Temanggung
Tahun 2002-2006

No	Tahun	Pendapatan pajak daerah
1	2002	Rp 2.662.500.000
2	2003	Rp 3518.000.000
3	2004	Rp 4.290.000.000
4	2005	Rp 4.205.000.000
5	2006	Rp 4.278.000.000

Sumber : BPS Kabupaten Temanggung

Sedangkan pendapatan dari sektor industri sendiripun masih tergolong kecil jika dibandingkan dengan pendapatan dari sektor retribusi. Hal ini bisa dilihat dalam tabel berikut ini:

TABEL 1.3
Daftar Pendapatan Sektor Industri di Kabupaten Temanggung
Tahun 2002-2006

No	Tahun	Pendapatan sektor industri
1	2002	Rp 709.705.84
2	2003	Rp 937.847.05
3	2004	Rp 971.183.77
4	2005	Rp 318.606.49
5	2006	Rp 392.480.98

Sumber : BPS Kabupaten Temanggung

Latar belakang menunjukkan pentingnya retribusi daerah sebagai salah satu penerimaan terbesar pada PAD di Kabupaten Dati II Temanggung, oleh karena itu penulis bermaksud mengangkat judul **“Analisis Pemungutan Retribusi Daerah dan Peranannya dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Studi di Kabupaten Temanggung Provinsi Jawa Tengah Tahun 2002-2006”**

B. Batasan Masalah

Retribusi daerah merupakan salah satu sektor yang mempunyai potensi besar untuk digali dan diperluas Penelitian ini ditekankan pada peran retribusi daerah dalam meningkatkan PAD di Kabupaten Temanggung dalam kurun waktu 5 tahun yaitu mulai tahun 2002 sampai tahun 2006.

Penelitian ini hanya ditekankan pada masalah retribusi karena sektor retribusi merupakan salah satu jenis pendapatan daerah yang paling besar di kabupaten Temanggung dan memiliki peluang yang besar untuk dikembangkan di masa mendatang

C. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan dalam latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana tingkat pertumbuhan penerimaan Retribusi Daerah di Kabupaten Temanggung tahun 2002-2006
2. Bagaimanakah efisiensi dan efektifitas penerimaan Retribusi Daerah di Kabupaten Temanggung tahun 2002-2006
3. Bagaimana peranan Pendapatan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Temanggung tahun 2002-2006
4. Bagaimana upaya pemerintah daerah Kabupaten Temanggung dalam meningkatkan pendapatan asli daerahnya di masa mendatang guna mencapai tingkat kemandirian daerah.

D. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian yang dilakukan ini adalah:

1. Untuk mengetahui tingkat pertumbuhan penerimaan Retribusi Daerah di Kabupaten Temanggung tahun 2002-2006

2. Untuk mengidentifikasi peranan retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Temanggung tahun 2002-2006
3. Untuk menganalisis efektifitas dan efisiensi penerimaan retribusi Daerah di Kabupaten Dati II Temanggung tahun 2002-2006
4. Mencari alternatif upaya pemerintah Kabupaten Temanggung dalam meningkatkan pendapatan asli daerahnya

E. Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang perumusan masalah dan tujuan penelitian manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah:

1. Bagi Penulis
 - a. Untuk melengkapi persyaratan penyelesaian studi di UMY Jurusan ilmu ekonomi.
 - b. Untuk menambah pengetahuan serta pengalaman apabila suatu saat terjun dalam lapangan pekerjaan.
2. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung
 - a. Sebagai bahan pertimbangan wawasan serta masukan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung dalam melaksanakan pembangunan daerah.
 - b. Dengan penelitian yang dilaksanakan maka pemerintah daerah bisa mengambil hal-hal yang sebelumnya belum diketahui oleh pemerintah daerah untuk selanjutnya bisa dijadikan bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan.

3. Bagi Akademisi

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi pengembangan khususnya ilmu ekonomi dan disiplin ilmu lainnya secara umum.